

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong pembangunan wilayah. Seiring perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan rekreasi, jumlah destinasi wisata yang tersedia semakin beragam sehingga diperlukan pengelolaan yang baik agar mampu bersaing dan memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan memerlukan perhatian terhadap aspek fasilitas, aksesibilitas, keamanan, dan kualitas pelayanan (Alam et al., n.d.).

Perkembangan destinasi wisata yang semakin pesat menuntut pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi dan penentuan prioritas pengembangan secara objektif. Tanpa adanya sistem yang terstruktur, proses penentuan prioritas pengembangan wisata berpotensi menjadi kurang efektif karena melibatkan banyak kriteria yang harus dipertimbangkan secara bersamaan (Aditya Putra Maulana¹, 2025).

Kabupaten-kabupaten di Indonesia yang memiliki banyak destinasi wisata sering menghadapi kendala dalam menentukan objek wisata mana yang harus diprioritaskan untuk dikembangkan. Berbagai faktor seperti jumlah pengunjung, kelengkapan fasilitas, aksesibilitas, keamanan, dan daya tarik wisata perlu

dipertimbangkan secara bersamaan dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu membantu pengambilan keputusan secara sistematis dan terukur (Jeffrey et al., 2024).

Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah yang cukup besar. Berbagai destinasi wisata terkenal seperti kawasan Tawangmangu, Grojogan Sewu, Candi Sukuh, Candi Cetho, serta berbagai wisata alam di Kecamatan Ngargoyoso menjadi daya tarik bagi wisatawan lokal maupun luar daerah. Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah.

Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, kepemudaan, dan olahraga. Dalam penyelenggaraan urusan kepariwisataan, Bidang Destinasi Wisata memiliki peran penting dalam memastikan setiap program pengembangan destinasi wisata berjalan sesuai dengan kebijakan dan target pembangunan pariwisata daerah. Untuk menjalankan tugas tersebut, bidang destinasi wisata melaksanakan kegiatan monitoring, pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap destinasi wisata. Monitoring dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai kondisi dan perkembangan destinasi wisata sebagai bahan pengambilan keputusan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan pengelolaan destinasi wisata berjalan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, pembinaan dilakukan melalui pemberian arahan, pendampingan, serta diskusi kepada pengelola destinasi wisata

sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, menyusun rekomendasi, serta menentukan prioritas pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Karanganyar.

Kabupaten Karanganyar memiliki sekitar 83 objek wisata yang tersebar di berbagai wilayah dengan karakteristik dan kondisi yang berbeda-beda. Sebagian besar objek wisata tersebut dikelola secara mandiri oleh pihak swasta atau pengelola masing-masing tanpa menjalin kerja sama pengelolaan secara langsung dengan Dinas Pariwisata. Dalam pengelolaannya, masing-masing pengelola memiliki kemampuan dan sumber daya yang berbeda, baik dalam menyediakan fasilitas, mengelola aksesibilitas, mengembangkan daya tarik wisata, maupun dalam melibatkan masyarakat dan kelembagaan di sekitar objek wisata. Perbedaan tersebut menyebabkan kondisi dan kebutuhan setiap objek wisata tidak dapat disamakan.

Meskipun sebagian besar objek wisata dikelola secara mandiri, Dinas Pariwisata tetap memiliki peran dalam memberikan pembinaan, pelatihan, pendampingan, monitoring, pengawasan, serta promosi sesuai dengan kebutuhan objek wisata. Pembinaan yang dilakukan perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing objek wisata karena tidak semua objek wisata memiliki permasalahan dan kebutuhan yang sama. Terdapat objek wisata yang memiliki potensi daya tarik yang baik tetapi masih memiliki keterbatasan pada aksesibilitas, amenitas, maupun pengelolaan kelembagaan. Sebaliknya, terdapat pula objek wisata yang telah

memiliki fasilitas dan pengelolaan yang relatif baik sehingga kebutuhan pembinaannya tidak sama dengan objek wisata lainnya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar, diketahui bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi wisata, Dinas Pariwisata melaksanakan berbagai kegiatan, seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pembinaan dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepariwisataan, mengembangkan sumber daya manusia pengelola, serta mewujudkan Sapta Pesona wisata agar destinasi mampu memberikan pengalaman wisata yang baik bagi wisatawan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pengembangan destinasi wisata untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, kenyamanan wisatawan, dan daya tarik destinasi. Namun, setiap objek wisata memiliki kondisi, potensi, dan tingkat perkembangan yang berbeda, sehingga diperlukan penentuan prioritas untuk mengidentifikasi objek wisata yang masih membutuhkan pengembangan.

Pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dilakukan sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan dari setiap objek wisata itu sendiri. Sebelum memutuskan objek wisata yang perlu mendapatkan perhatian dalam pembangunan, dinas terlebih dahulu mengenali kondisi dan masalah yang ada di objek wisata tersebut. Berdasarkan hasil wawancara, penilaian terhadap kondisi objek wisata dilihat dari empat aspek, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancilaritas (4A). Aspek atraksi mencakup keunikan alam, seni budaya, dan makanan khas setempat yang membuat wisata menjadi menarik. Aspek aksesibilitas berkaitan dengan sejauh mana pengunjung dapat sampai ke tempat wisata, termasuk kondisi jalan dan

jenis kendaraan yang bisa mencapai lokasi tersebut. Aspek amenitas mencakup adanya fasilitas pendukung, seperti tempat untuk makan dan penginapan. Sementara itu, aspek ancilaritas berkaitan dengan keberadaan masyarakat setempat yang terlibat dalam mengelola dan mengembangkan tempat wisata tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan prioritas pengembangan tidak hanya melihat satu indikator saja, tetapi juga memperhatikan berbagai aspek kondisi serta potensi dari objek wisata tersebut, dan ada aspek jumlah kunjungan wisatawan. Kemudian ada aspek rating oleh pengguna.

Selain kegiatan pengembangan, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Dinas Pariwisata tidak memberikan bantuan dana secara langsung kepada objek wisata. Kegiatan pembinaan yang dilakukan lebih difokuskan pada peningkatan kemampuan pengelola melalui pelatihan dan pendampingan sesuai dengan kebutuhan objek wisata. Sementara itu, apabila suatu objek wisata membutuhkan bantuan dana untuk pengembangan, pengelola dapat mengajukan permohonan bantuan kepada Bupati atau DPRD. Apabila pengajuan tersebut telah disetujui, Dinas Pariwisata berperan dalam membantu proses administrasi dan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, Dinas Pariwisata dalam hal ini lebih berperan sebagai pihak yang melakukan pembinaan serta membantu proses pencairan bantuan setelah adanya persetujuan dari pihak yang berwenang. Jadi dinas pariwisata hanya memberikan pengembangan dengan cara melakukan pembinaan, ataupun promosi, ataupun melakukan pelatihan kepada pihak pengelola objek wisata.

Untuk menentukan tingkat pentingnya setiap kriteria, bobot bisa ditentukan sesuai dengan seberapa penting masing-masing kriteria dalam menentukan prioritas pengembangan obyek wisata. Namun, berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pariwisata belum menetapkan patokan atau bobot baku untuk setiap kriteria. Sebab itu, pembobotan dalam sistem tersebut harus dibuat dengan memperhatikan tingkat pentingnya setiap kriteria dalam menentukan urutan prioritas pengembangan objek wisata.

Selain mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan objek wisata, Dinas Pariwisata juga melakukan monitoring secara rutin untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran data yang disampaikan oleh pengelola objek wisata. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meminimalkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian atau manipulasi data. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa riwayat pembinaan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas. Apabila terdapat beberapa objek wisata yang memiliki tingkat kebutuhan yang sama, objek wisata yang belum pernah mendapatkan pembinaan akan lebih diprioritaskan dibandingkan objek yang sebelumnya telah mendapatkan pembinaan. Dengan demikian, riwayat pembinaan dapat menjadi pertimbangan tambahan dalam proses penentuan prioritas pengembangan objek wisata.

Namun, proses penentuan prioritas pengembangan sarana prasarana objek wisata masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, penentuan prioritas masih bersifat subjektif karena belum didukung oleh mekanisme penilaian yang objektif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Kondisi inilah yang menyebabkan objek wisata yang masih memiliki kekurangan belum tentu menjadi prioritas

pengembangan. Kedua, hasil penilaian belum diolah menjadi pemeringkatan yang terukur, sehingga dinas pariwisata belum mempunyai dasar yang jelas dalam menentukan urutan prioritas pengembangan setiap objek wisata. Ketiga, proses dalam menentukan prioritas belum efisien karena memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk membandingkan hasil penilaian dari seluruh objek wisata, sehingga dapat memperlambat pelaksanaan program pembinaan, pelatihan, pendampingan maupun promosi,

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu proses pengolahan hasil evaluasi dan pemeringkatan kualitas destinasi wisata secara lebih objektif, terstruktur, dan efisien. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem prioritas pengembangan sarana prasarana objek wisata di Kabupaten Karanganyar menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW). Metode SAW dipilih karena mampu mengolah beberapa kriteria penilaian, yaitu jumlah kunjungan wisatawan, ketersediaan fasilitas, dan rating wisatawan, melalui proses pembobotan dan perhitungan sehingga menghasilkan nilai preferensi serta urutan pemeringkatan setiap destinasi wisata. Hasil pemeringkatan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (DISPARPORA) Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas pembinaan, pendampingan, pelatihan, dan program pengembangan sarana prasarana objek wisata secara lebih objektif, transparan, dan terukur.

Penelitian yang dilakukan oleh (Singgalen, 2023) menunjukkan bahwa metode SAW dapat digunakan untuk menentukan prioritas pengembangan kawasan

ekowisata berdasarkan sejumlah kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, (Aditya Putra Maulana¹, 2025) menjelaskan bahwa SAW efektif digunakan dalam proses pengambilan keputusan multikriteria pada bidang pariwisata sehingga mampu menghasilkan peringkat alternatif yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan. (Sazaki & Jambak, 2023) juga membuktikan bahwa metode SAW memiliki kemampuan yang baik dalam melakukan proses perangkingan alternatif berdasarkan bobot dan nilai setiap kriteria.

Sistem pendukung keputusan yang dikembangkan pada penelitian ini bertujuan membantu Dinas Pariwisata dalam menentukan prioritas pengembangan objek wisata berdasarkan data kondisi masing-masing objek wisata. Proses diawali dengan pengelola objek wisata melakukan login dan mengisi data penilaian berdasarkan aspek atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancilaritas (4A). Data yang telah diinput kemudian disimpan ke dalam basis data untuk dilakukan verifikasi oleh admin Dinas Pariwisata sebelum digunakan dalam proses perhitungan.

Admin Dinas Pariwisata juga mengelola data objek wisata dan riwayat pembinaan sebagai informasi pendukung dalam menentukan kandidat prioritas. Sistem kemudian melakukan proses pemeringkatan menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW) berdasarkan bobot masing-masing kriteria. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan setiap kriteria dalam menentukan prioritas pengembangan objek wisata. Setiap kriteria juga ditentukan jenis atributnya, yaitu benefit atau cost, sesuai dengan arah penilaian yang digunakan. Pada aspek Atraksi, penilaian meliputi keunikan alam, seni budaya, dan kuliner lokal. Pada aspek Aksesibilitas, penilaian meliputi kemudahan akses jalan menuju

objek wisata. Pada aspek Amenitas, penilaian meliputi ketersediaan tempat makan dan penginapan, sedangkan pada aspek Ancilaritas penilaian meliputi keberadaan kelompok atau masyarakat lokal yang berperan dalam pengelolaan dan pengembangan objek wisata. Penentuan atribut benefit dan cost disesuaikan dengan arah penilaian setiap indikator agar hasil perhitungan mencerminkan tingkat kebutuhan pengembangan objek wisata.

Objek wisata yang memiliki tingkat kebutuhan pengembangan lebih tinggi akan memperoleh prioritas yang lebih tinggi. Hasil pemeringkatan tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Dinas Pariwisata dalam menentukan objek wisata yang perlu mendapatkan perhatian melalui kegiatan pengembangan, seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan, dan promosi. Selain itu, riwayat pembinaan digunakan sebagai pertimbangan agar objek wisata yang telah mendapatkan pembinaan dalam periode tertentu tidak menjadi prioritas kembali.

Setelah seluruh fungsi sistem selesai dikembangkan, dilakukan pengujian black box testing untuk memastikan fungsi sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selanjutnya dilakukan pengujian *system usability scale* (SUS) kepada pegawai Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar serta pengelola objek wisata untuk mengetahui tingkat kemudahan penggunaan sistem.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan suatu sistem pendukung keputusan yang mampu membantu dinas pariwisata, pemuda, dan olahraga Kabupaten Karanganyar dalam menentukan prioritas pengembangan objek wisata secara objektif, efektif, dan terukur. Sistem yang dikembangkan memungkinkan pengelola objek wisata menginput data penilaian berdasarkan kriteria jumlah

kunjungan wisatawan dalam satu tahun, kecukupan fasilitas, rating objek wisata dan potensi 4A. Selanjutnya, sistem secara otomatis mengolah data tersebut menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW) melalui proses pembobotan, normalisasi, dan perhitungan nilai preferensi sehingga menghasilkan pemeringkatan kualitas objek wisata. Hasil pemeringkatan tersebut menjadi rekomendasi bagi dinas pariwisata dalam menentukan prioritas program pengembangan, seperti pembinaan, pelatihan, pendampingan, maupun promosi, sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat, objektif, dan terukur. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pembangunan sistem pendukung keputusan prioritas pengembangan kualitas objek wisata di Kabupaten Karanganyar menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diperlukan perumusan masalah agar penelitian memiliki arah dan tujuan yang jelas. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana merancang dan membangun sistem prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten Karanganyar yang dapat mendukung proses penentuan prioritas pembinaan dan pengembangan destinasi wisata secara lebih objektif?
- b. Bagaimana menerapkan metode *simple additive weighting* (SAW) pada sistem untuk mengolah nilai berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan sehingga menghasilkan pemeringkatan prioritas pengembangan objek wisata yang terukur?

- c. Bagaimana menguji tingkat fungsionalitas sistem berdasarkan hasil pengujian *black box testing* serta tingkat penerimaan pengguna (*usability*) berdasarkan hasil pengujian *system usability scale* (SUS) yang dilakukan kepada pihak dinas pariwisata, pengelola objek wisata, dan pengunjung?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki beberapa batasan agar pembahasan lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten Karanganyar.
- b. Metode yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan adalah *simple additive weighting* (SAW).
- c. Kriteria yang digunakan dalam proses pemeringkatan yaitu jumlah kunjungan wisata, kecukupan fasilitas, rating objek wisata dan penilaian potensi 4A.
- d. Sistem dibangun untuk membantu menghasilkan proses penilaian dan pemeringkatan prioritas pengembangan objek wisata yang lebih objektif dan terukur berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditentukan.
- e. Output sistem berupa hasil pemeringkatan prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten Karanganyar.
- f. Pengujian fungsional sistem dilakukan menggunakan *black box testing*, sedangkan pengujian usability dilakukan menggunakan *system usability scale* (SUS) dengan responden dari pihak Dinas Pariwisata, pengelola objek wisata, dan pengunjung wisata.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Merancang dan membangun sistem pendukung keputusan untuk menentukan prioritas pengembangan objek wisata di Kabupaten Karanganyar menggunakan metode *simple additive weighting* (SAW) sehingga membantu menghasilkan proses penilaian yang lebih objektif.
- b. Menerapkan metode *simple additive weighting* (SAW) untuk menghasilkan pemeringkatan prioritas pengembangan objek wisata berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- c. Mengetahui tingkat fungsionalitas sistem melalui pengujian menggunakan *black box testing* serta tingkat penerimaan pengguna (*usability*) melalui pengujian menggunakan *system usability scale* (SUS).

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Karanganyar
 1. Membantu Dinas Pariwisata dalam menentukan prioritas pengembangan objek wisata secara lebih objektif, efektif, dan terukur.
 2. Memberikan rekomendasi berupa hasil perangkingan objek wisata berdasarkan berbagai kriteria sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan Keputusan.

3. Mendukung proses evaluasi dan perencanaan program pengembangan objek wisata agar lebih tepat sasaran.

b. Bagi Objek Wisata

1. Memberikan informasi mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan pada objek wisata.
2. Menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan pelayanan wisata

c. Bagi Pengunjung/Wisatawan

1. Memudahkan pengunjung memperoleh informasi mengenai objek wisata yang tersedia di Kabupaten Karanganyar.
2. Memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk memberikan penilaian terhadap objek wisata berdasarkan rating, atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancilaritas.
3. Membantu pengunjung mengetahui hasil pemeringkatan objek wisata berdasarkan hasil perhitungan sistem.

d. Bagi Peneliti

1. Menambah wawasan dan pengalaman dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).
2. Meningkatkan kemampuan dalam pengembangan sistem pendukung keputusan pada bidang pariwisata.